

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyebutkan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Peningkatan angka penerimaan pajak akan dipandang baik bagi pemerintah, karena fungsi pajak sendiri salah satunya adalah sebagai sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran guna pembangunan namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dan dapat mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh perusahaan maka semakin kecil pula laba yang dihasilkan (Septianingrum, F., Damayanti, D., & Maryani, M, 2022).

Laporan keuangan digunakan sebagai alat dalam menyajikan posisi keuangan perusahaan secara terstruktur dan gambaran hasil ekonomi perusahaan (Setyawan, dkk, 2021). Manajemen perusahaan menyusun laporan keuangan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Pihak internal yaitu manajemen yang memerlukan informasi laporan keuangan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Sedangkan pihak eksternal terdiri atas investor, kreditor, pelanggan,

pemasok, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat umum (Sari, Hardiyanto dan Simamora, 2019). Dengan adanya laporan keuangan para investor dapat melihat kondisi suatu perusahaan berdasarkan data – data yang akrual. Sebagai pengelola perusahaan, manajer harus dapat mengakses informasi secara lebih baik dan berkualitas mengenai kinerja perusahaan. Informasi tersebut salah satunya mengenai laba. Laba mempunyai peran yang sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laba seringkali dijadikan indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Lilik Purwakti, 2021:1). Pihak internal dan eksternal perusahaan mempergunakan laba sebagai dasar atas pengambilan keputusan seperti kompensasi, ukuran prestasi, kinerja manajemen, pengambilan keputusan investasi serta dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Di sisi lain, laba perusahaan merupakan target rekayasa bagi pihak manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, sehingga pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan kualitas informasi laba sebaik mungkin. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya (Irawan & Kartika, 2021).

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dengan memanipulasi angka – angka dalam

laporan keuangan dan mempermainkan metode atau prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Putra, Y. M & Kurnia, 2019). Upaya peningkatan nilai perusahaan yang tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sebenarnya, tetapi bertujuan untuk meningkatkan sesuai dengan keinginan manajemen (Putra, Y. M & Kurnia, 2019). Terdapat beberapa alasan mengapa manajer melakukan manajemen laba. Salah satunya adalah untuk kepentingan meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan dan juga untuk memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor (Sulistyanto, 2014:65-94). Manajemen laba bisa timbul akibat adanya tekanan dari dalam maupun dari luar perusahaan, yang berhubungan dengan kinerja manajemen yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan (Lilik Purwakti, 2021:8). Praktik manajemen laba dapat terjadi karena konflik keagenan yang digambarkan dalam agency theory (Fandriani V & Tunjung H, 2019). Selain itu manajemen laba juga tidak selalu terkait dengan upaya untuk memanipulasi data akuntansi, tetapi dengan metode akuntansi yang sengaja dipilih oleh manajemen (Fandriani V & Tunjung H, 2019). Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Meita, 2019).

Fenomena adanya praktik manajemen laba dilakukan salah satunya oleh perusahaan manufaktur yaitu kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food yang merupakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga telah terjadi penggelembungan senilai Rp.

4 triliun oleh manajemen lama pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Hasil Investigasi Berbasis Fakta yang dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA yang tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp 4 triliun lalu ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Antara lain menggunakan pencairan pinjaman Grup AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA (EY, 2023).

Direktur Pemeriksaan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Broto Suwarno membeberkan bukti-bukti manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Kedua terdakwa (Joko Mogoginta dan Budhi Istanto) menuliskan enam perusahaan afiliasi sebagai pihak ketiga dalam laporan keuangan AISA tahun 2017 (Edi, 2019). Dalam kasus ini informasi keuangan perusahaan tidak disajikan sesuai kondisi serta pencapaian perusahaan yang menyebabkan banyak kerugian antara lain adalah memberikan informasi palsu kepada para investor, kredibilitas perusahaan semakin berkurang dan citra perusahaan dari masyarakat menjadi buruk. Oleh karena itu disarankan

untuk Perusahaan dengan ukuran besar harus mempertimbangkan implikasi dari praktik manajemen laba. Perusahaan - perusahaan besar mungkin perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menghindari risiko yang terkait dengan praktik manajemen laba yang berlebihan.

Adapun fenomena yang kedua terkait tentang manajemen laba di Indonesia yaitu Polemik laporan keuangan Garuda Indonesia ini bermula pada 24 April 2019 atau saat RUPS. Salah satu agendanya mengesahkan laporan keuangan tahunan 2018. Namun dalam RUPS tersebut terjadi kisruh karena dua komisaris menyatakan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut. Diketahui dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba bersih yang salah satunya ditopang oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Terknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya masih bersifat piutang dengan kontrak berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Alhasil, perusahaan yang sebelumnya merugi kemudian mencetak laba. Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang enggan menandatangani laporan keuangan 2018. Kisruh berlanjut hingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan ikut mengaudit permasalahan tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPK juga ikut melakukan audit. PPPK dan OJK pun akhirnya memutuskan bahwa ada yang salah dalam sajian laporan keuangan GIAA 2018. Perusahaan diminta untuk menyajikan ulang laporan keuangannya dan perusahaan dikenakan denda Rp 100 juta berikut

dengan direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Setelah dilakukan penyesuaian pencatatan maskapai penerbangan nasional ini akhirnya mencatatkan kerugian US\$ 175 juta atau setara Rp 2,53 triliun. Ada selisih US\$ 180 juta dari yang disampaikan dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2018. Pada 2018 perseroan melaporkan untung US\$ 5 juta atau setara Rp 72,5 miliar. Deputi Komisioner Pasar Modal II OJK memberikan perintah tertulis Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan lakukan public expose. Perbaikan dan public expose wajib dilakukan 14 hari setelah ditetapkan oleh OJK (Fakhri Hilmi, 2019)

Kasus manajemen laba di Indonesia terjadi pada PT Lippo Karawaci Tbk. yang terletak di kawasan millennium village, Tangerang, Banten. Dari pernyataan senior Analyst CSA Research Institute bahwa laporan keuangan PT Lippo Karawaci Tbk mencerminkan terjadinya praktek suap atau manajemen laba yang dilakukan oleh petinggi Lippo Grup dalam kondisi laporan keuangan pada semester pertama 2018 (Reza Priyambada, 2018). Artinya, kejadian kasus dugaan penyuapan yang melibatkan petinggi Lippo Group belum terefleksikan di sana. Serta proyek prestisius perseroan, yakni Meikarta. Namun peningkatan laba bersih yang drastis ini disebabkan oleh keuntungan atas dekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) atau pengembang Meikarta, anak perusahaan tidak langsung dari emiten berticker PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) ini, dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 1,3 triliun (Caesairo, 2018).

Fenomena selanjutnya salah satu emiten di bidang jasa dan perdagangan di bidang teknologi informasi PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan

anak usahanya adanya dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2019 yang menerpa salah. Hal ini terungkap dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh manajemen ENVY dalam suratnya kepada BEI, 21 Juli 2021 pekan lalu. Dalam surat tersebut ENVY menjelaskan duduk perkara terkait dengan dugaan adanya manipulasi atas laporan keuangan (lapkeu) anak usahanya, PT Ritel Global Solusi (RGS) tahun 2019. Laporan keuangan 2019 RGS itu kemudian dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan ENVY tahun 2019. RGS adalah anak usaha ENVY dengan porsi kepemilikan 70% yang bergerak bidang jasa perdagangan dengan berbasis online melalui aplikasi "KO-IN". Corporate Secretary ENVY mengatakan pada 7 Juni 2021 telah diadakan pertemuan antara direksi perseroan dan manajemen RGS untuk membahas permasalahan tersebut (Jovana, 2021)

Adapun faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul karena perbedaan laba dalam laporan keuangan akuntansi untuk kepentingan eksternal dengan laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan perpajakan (Zai, Masyitah, 2023). *Deferred tax expense* sebagai total dari beban pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak yang dibebankan kepada perusahaan pada periode berikutnya karena adanya perbedaan temporer pada laba sebagai dasar pengenaan pajak (Afifah, 2018). Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan (Sari, Hardiyanto dan Simamora, 2019). Perbedaan antara laba akuntansi dan laba

fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya saldo akhir (Shinta & Sopian D, 2021). Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal inilah yang menimbulkan beban pajak tangguhan (Kanji, 2019).

Beban pajak tangguhan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi manajemen laba dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian (Irawan dan Kartika, 2021). Umumnya, perusahaan selalu berupaya untuk melakukan sebuah rekayasa untuk meminimalkan beban pajak dalam rangka agar meningkatkan nilai laba. Akibat adanya upaya itu mendorong meningkatnya beban pajak tangguhan (Roza Z A, 2019). Beban pajak tangguhan yang tinggi bisa mendorong suatu perusahaan dalam menjalankan tindakan manajemen laba dikarenakan dapat mengurangi tingkat laba yang ada (Putra, 2019). Beban pajak tangguhan dapat mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun sehingga mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Hal ini menjadi celah bagi manajer dalam melakukan manajemen laba yaitu dengan cara memanipulasi jumlah laba bersih sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan (Yuliza dan Fitri, 2020). Beban pajak tangguhan ini akan dipulihkan dimasa yang akan datang kemudian akan menjadi beban perusahaan (Riaty Handayani et al., 2020). Penghitungan tentang beban pajak tangguhan (*defferent tax expense*) dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset (Irawan dan Kartika, 2021).

Jika dilihat penelitian terdahulu menurut Penelitian (Rahayu & Machdar, 2019) dan (Baraja et al., 2019) membuktikan adanya pengaruh positif beban pajak tangguhan atas tindakan manajemen laba. Adapun menurut Sutadipraja, Ningsih, & Mardiana (2020) menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan hasil penelitian yang ditulis Sutadipraja, Ningsih dan Mardianad (2019) menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berbanding terbalik dengan penelitian Gulo dan Mappadang (2022) yang menghasilkan negatif pada variabel beban pajak tangguhan menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan mempengaruhi kinerja manajemen pada pencapaian laba, hal ini tidak sesuai dengan tujuan manajemen untuk menyajikan angka laba yang maksimal. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Lubis & Suryani (2018) menunjukkan bahwa besarnya beban pajak tangguhan perusahaan bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian Irawan & Kartika (2021) ini juga menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Akibatnya, administrasi tidak dapat memanfaatkan jumlah beban pajak tangguhan tersebut, karena pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT telah dikoreksi dan pajak tidak mencatat beban pajak tangguhan yaitu hanya pembayaran pajak untuk tahun ini.

Faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen laba adalah aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibatkan beban pajak menurut

akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang - undang pajak (Irawan & Kartika, 2021). Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus dan beban politis atas besarnya perusahaan sehingga manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Aset yang ditangguhkan didefinisikan sebagai pajak penghasilan yang terpulihkan sebagai kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan dimasa mendatang karena adanya perbedaan temporer (Yahya & Wahyuningsih, 2020). Perbedaan temporer yang diakui adalah jumlah tercatat yang dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset atau liabilitas (Kusmala, 2018). Aset pajak tangguhan diakui sebagai akibat karena jumlah laba yang dicatat secara akuntansi lebih kecil dibandingkan perhitungan laba secara perpajakan (Gulo M M & Mappadang A, 2022). Hal ini menimbulkan adanya koreksi positif pada laporan laba keuangan pada koreksi fiscal, Aset pajak tangguhan harus dicatat berdasar pada seberapa besar hasil realisasi atas manfaat pajak yang didapat, sehingga perlu judgement (penilaian) manajer perusahaan terhadap jumlah aset pajak tangguhan yang dicatat (Gulo M M & Mappadang A, 2022). Jumlah aset dari pajak tangguhan yang dicatat semakin tinggi oleh perusahaan, mengindikasikan terjadi manajemen laba, juga semakin tinggi nilai dari aset dari pajak tangguhan, maka peluang semakin besar melakukan tindakan manajemen laba (Septiadi et al., 2017). Pengukuran variabel aset pajak tangguhan menggunakan nilai aset pajak tangguhan saat ini dengan aset pajak tangguhan sebelumnya dan membandingkannya dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut (Yahya & Wahyuningsih, 2020).

Fenomena mengenai implementasi aset pajak tangguhan pada PT Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) membukukan laba bersih sebesar Rp24,984 miliar dalam tiga bulan pertama tahun 2022, atau membaik dibandingkan periode sama tahun 2021 yang mencatatkan rugi bersih senilai Rp396,82 miliar. Sehingga emiten telekomunikasi grup Sinarmas ini menorehkan laba per saham dasar Rp0,08, sedangkan di akhir Maret 2021 masih rugi per saham sebesar Rp1,28. Data tersebut tersaji dalam laporan keuangan kuartal I 2022 tanpa audit FREN yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (27/5/2022). Pendapatan usaha tumbuh 11,3 persen menjadi Rp2,678 triliun, ditopang pendapatan data sebesar Rp2,407 triliun atau tumbuh 9,2 persen dibanding kuartal I 2021 sebesar Rp2,204 triliun. Walau beban usaha membengkak 2,25 persen menjadi Rp2,542 triliun. Namun perusahaan dapat membukukan laba usaha senilai Rp136,55 miliar, atau membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat rugi usaha Rp80,407 miliar. Perseroan membukukan laba dari entitas asosiasi senilai Rp31,938 miliar. Ditambah keuntungan dari nilai wajar opsi konversi senilai Rp11,108 miliar, atau membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang rugi dari konversi perubahan nilai wajar opsi konversi senilai Rp9,535 miliar. Hasilnya, rugi sebelum pajak menyusut 80,8 persen dan tersisa Rp95,73 miliar. Meski demikian, kinerja FREN tertolong setelah perseroan mendapatkan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp120,72 miliar, atau tumbuh 22,4 persen dibandingkan kuartal I 2021 sebesar Rp98,92 miliar. Sehingga, perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp24,987 miliar, atau membaik dibanding kuartal I 2021 yang mencatatkan rugi periode berjalan Rp396,83 miliar. Dari kasus diatas menyatakan jika terdapat peningkatan aset pajak

tanggungan, jika jumlah aset pajak tanggungan semakin besar maka semakin tinggi indikasi manajemen melakukan manajemen laba (earning management) (Y.M Putra, 2019)

Hasil penelitian terdahulu menurut Sutadipraja, Ningsih, & Mardiana (2020) menyatakan bahwa aset pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian milik Simanjuntak (2022) Aset pajak tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian oleh Yogi & Kurnia (2019) serta Noorjannah & Rachmawati (2021) terkait aset pajak tanggungan terhadap manajemen laba dikatakan berpengaruh signifikan. Menurut (Sutadipraja et al., 2019) dan (Septa et al., 2020), membuktikan aset pajak memiliki signifikan positif pada tindakan rekayasa keuangan. Ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rudy, Lasmanita & Yunus (2019) aset pajak tanggungan atas manajemen laba tidak berpengaruh signifikan. Sama halnya dengan penelitian Gulo dan Mappadang (2022) Aset pajak tanggungan menunjukkan hasil negatif yang menunjukkan aset pajak tanggungan yang diakui perusahaan pada periode tertentu tidak mempengaruhi tujuan manajemen melakukan manajemen laba karena berbagai macam motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang dapat menunjukkan skala sebuah perusahaan (Habibie dan Prasetya, 2022). Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih, semakin besar laba bersih perusahaan maka perusahaan dianggap semakin besar (Simanjuntak, 2022). Ukuran perusahaan menggambarkan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang

dimiliki perusahaan (Dewi, dkk, 2019). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Penentuan besarnya perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan (Wulansari, 2019). Total aset dipilih sebagai proksi karena menurut, total aset dianggap lebih stabil dibandingkan dengan peringkat lain yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan (Wulansari, 2019). Semakin besar ukuran perusahaan dari sebuah perusahaan maka semakin meningkat pula nilai perusahaan tersebut (Anggadan Wiksuana, 2016). Di dalam aset yang besar ada modal besar di dalamnya, semakin besar tingkat penjualan berarti bahwa perputaran uangnya pun semakin besar sehingga kapitalisasi perusahaan bertambah menjadi besar (Sulistyanto, 2018).

Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dibanding perusahaan yang lebih besar (Jalo & Galgalring, 2011). Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang kinerjanya baik, sehingga menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut (Maitri dan Meiden, 2022). Perusahaan yang lebih besar cenderung diperhatikan masyarakat, oleh sebab itu perusahaan lebih berhati - hati dalam pelaporan keuangan yang mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih akurat (Maitri dan Meiden, 2022). Perusahaan besar merupakan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan lebih tinggi, tingkat kestabilan perusahaan lebih tinggi dan lebih banyak pihak yang terlibat, keputusan perusahaan besar mempengaruhi publik, sehingga masyarakat

mengenal perusahaan besar lebih baik daripada perusahaan kecil (Suheny Eny, 2019). Perusahaan yang besar diasumsikan menghindari praktik manajemen laba, karena perusahaan yang besar lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat (Pasaribu, et al, 2016). Sedangkan, perusahaan yang kecil akan cenderung melakukan manajemen laba karena membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk saham (Pasaribu, et al, 2016). Keterlibatan ukuran perusahaan dengan manajemen laba adalah semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula paksaan yang dihadapi karena perusahaan tersebut akan menjadi sorotan dan pengawasan sehingga manajer tidak bisa leluasa melakukan penerapan manajemen laba (Paramitha dan Idayati, 2020). Jadi semakin kecil ukuran perusahaan manajer semakin memiliki peluang dalam melakukan manajemen laba (Paramitha dan Idayati, 2020).

Salah satu perusahaan berskala besar yaitu perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Sepanjang 2022, laba bersih PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tercatat Rp 5,36 triliun, turun 6,83% dibandingkan 2021 yang mencapai Rp 5,75 triliun. Pendapatan emiten barang konsumsi ini sejatinya masih naik 4,22% secara tahunan menjadi Rp 41,22 triliun. Pada 2021, pendapatan UNVR hanya mencapai Rp 39,54 triliun. Beban pokok penjualan UNVR naik lebih tinggi 11% secara tahunan menjadi Rp 22,15 triliun, Ini antara lain karena pos beban pabrikan lainnya naik dari Rp 1,70 triliun di 2021 jadi Rp 2,22 triliun di 2022, Alhasil laba kotor tergerus 2,86% menjadi Rp 19,06 triliun. UNVR menghadapi tantangan berupa kenaikan harga komoditas dan bahan bakar (Ira Noviarti, 2023). Kebutuhan rumahtangga dan perawatan tubuh

menjadi kontributor utama penjualan UNVR dengan total pendapatan Rp 27,25 triliun, tumbuh 3,33% secara tahunan, Sedangkan segmen makanan dan minuman mencetak pendapatan Rp 13,96 triliun, atau masih tumbuh 6,07% secara tahunan. Dampak dari penurunan laba ini saham UNVR terperosot 6,91% ke level Rp 4.580 per saham dan jadi net sell terbesar asing. Kenaikan beban pokok pendapatan UNVR lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatannya yang terbatas (Desy Israhianti, 2022). Dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan besar akan memiliki laba yang tinggi diikuti dengan pembayaran pajak yang tinggi juga, indikasi praktik manajemen laba bisa saja terjadi jika perusahaan besar mengalami penurunan laba yang nantinya mempengaruhi para investor atau citra masyarakat. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, sehingga pihak manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk menghasilkan laba sebaik mungkin. Perusahaan yang lebih besar cenderung mendapat perhatian lebih dari pihak luar seperti investor, analis dan pemerintah. Oleh karena itu perusahaan untuk menghindari kenaikan laba yang terlalu tajam karena penyebabnya ewajiban seperti pajak. Semakin tinggi ukuran perusahaan, maka perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba dengan cara perataan atau meminimumkan laba (Astria dkk, 2021).

Menurut Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik laba. Llukani (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian milik Simanjuntak (2022) ukuran perusahaan yang

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Samjaya & Djohar (2023) menghasilkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Astriah dan Akhbar (2021) ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang berarti bahwa ukuran perusahaan yang besar belum tentu melakukan praktik manajemen laba. Adapun berdasarkan Yasa, Sunarsih dan Pramesti (2022) hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat praktik manajemen laba yang terjadi di perusahaan – perusahaan besar di Indonesia.
- 2) Peningkatan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan yang dicatat oleh perusahaan semakin tinggi dapat mengindikasikan terjadi manajemen laba.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba
- 2) Seberapa besar pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
- 3) Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji rumusan masalah dan memperoleh data yang terkait untuk dianalisis lebih lanjut sehingga mengetahui kebenaran bahwa Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi Manajemen Laba.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba
- 2) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba
- 3) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan solusi permasalahan praktik manajemen laba kesalahan penyajian dalam laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi terhadap perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya mengenai topik, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, ukuran dan manajemen laba. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai kelengkapan pengungkapan pada masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pembuktian kembali dari teori – teori dan hasil terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama pada perusahaan manufaktur terkait Manajemen Laba, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan.